

REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. VISI : Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
3. MISI : 1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1.496.777.811,0
Total		1.496.777.811,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Komoditas Pertanian yang Tersedia		23.358.166.546,0
01.01	Jumlah Produk Pertanian Strategis dalam Negeri	...	
01.02	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan	92,5	
01.03	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	85,0	
01.04	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,50	
01.05	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	58,00	
01.06	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90,56	
02	Komoditas Pertanian Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing		4.600.194.725,0
02.01	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86,90	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02.02	Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	35	
03	Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional Yang Berkualitas		561.706.039,0
03.01	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	90	
03.02	Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya	22	
03.03	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	90	
04	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien, dan Akuntabel		3.394.097.574,0
04.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,20	
04.02	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	92,73	
Total			31.914.164.884,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
018.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.949.405.031,0	1.282.238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	2.955.313.598,0	0,0	0,0	0,0
018.WA	Program Dukungan Manajemen	108.999.397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108.999.397,0	0,0	0,0	0,0
Total		3.058.404.428,0	1.282.238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	3.064.312.995,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, Desember 2025
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si
NIP. 197807272005011001

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. UNIT ORGANISASI : 05 - Ditjen Perkebunan
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Komoditas Pertanian Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
4. PROGRAM : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1.496.777.811,0
02.10	Swasembada Pangan	1.496.777.811,0
Total		1.496.777.811,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah		17.605.441,0
01.04	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	82	
01.05	Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	47	
01.06	Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40	
02	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing		2.937.708.157,0
02.04	Nilai ekspor produk perkebunan	31	
Total			2.955.313.598,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	90.509.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.509.020,0	0,0	0,0	0,0
1779	Pelindungan Perkebunan	10.396.420,0	144.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.541.168,0	0,0	0,0	0,0
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	1.811.291.962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.811.291.962,0	0,0	0,0	0,0
5889	Hilirisasi Hasil Perkebunan	11.805.287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	16.431.616,0	0,0	0,0	0,0
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1.025.402.342,0	1.137.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.026.539.832,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.949.405.031,0	1.282.238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	2.955.313.598,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, Desember 2025

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si

NIP. 197807272005011001

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. UNIT ORGANISASI : 05 - Ditjen Perkebunan
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien, dan Akuntabel
4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien		103.752.782,0
01.05	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	75	
02	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel		5.246.615,0
02.05	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Perkebunan	85	
Total			108.999.397,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	108.999.397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108.999.397,0	0,0	0,0	0,0
	Total	108.999.397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108.999.397,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, Desember 2025

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si

NIP. 197807272005011001

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing
4. KEGIATAN : 1777 - Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya Produksi Tanaman Ekspor dari Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma		90.509.020,0
01.01	Produksi kelapa sawit (CPO)	47.929.374	
01.02	Produksi kelapa	2.880.690	
01.03	Produksi gula aren	126.070	
01.04	Produksi sagu	393.623	
01.05	Produksi Pinang	90.970	
01.06	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	3,5	
Total			90.509.020,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Produksi Tanaman Ekspor dari Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma										90.509.020,0
01.AEA	Koordinasi										2.107.938,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma										2.107.938,0
	051 - Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma										2.107.938,0
		Pusat	Pusat								2.107.938,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										318.032,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma										318.032,0
	051 - Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma										318.032,0
		Pusat	Pusat								318.032,0
01.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan										88.083.050,0
01.RAI.001	Kawasan Kelapa										82.136.748,0
	051 - Perluasan Tanaman Kelapa										57.393.565,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								517.000,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin								445.500,0
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan								814.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat								1.221.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi								959.750,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								291.500,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan								2.256.100,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran								238.150,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.728.240,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas								2.728.800,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara								364.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen								1.819.200,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonosobo								2.728.800,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonogiri								2.728.800,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan								1.442.650,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati								742.500,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								2.864.485,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul								2.774.265,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul								722.700,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman								2.255.500,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ponorogo								858.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember								1.991.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Lebak								1.942.600,0
		Provinsi Bali	Kab. Buleleng								578.600,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau								471.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang								235.950,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang								471.900,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan								471.900,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar								6.391.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng								3.089.900,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto								2.349.050,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai								2.396.625,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								3.834.600,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang								2.260.500,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan								407.000,0
	052 - Peremajaan Tanaman Kelapa										20.753.920,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara								471.900,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman								358.600,0
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat								407.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan								407.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang								407.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Lingga								588.500,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi								294.800,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur								609.400,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis								301.400,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon								294.800,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat								295.900,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga								346.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								339.900,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali								335.225,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati								346.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								357.500,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								341.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek								344.300,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang								2.000.350,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi								308.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Nganjuk								326.150,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tuban								319.550,0
		Provinsi Banten	Kab. Lebak								317.020,0
		Provinsi Bali	Kab. Karangasem								349.250,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende								450.450,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao								429.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Mempawah								235.950,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur								471.900,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow								330.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara								330.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai								370.700,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol								380.600,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								390.500,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan								407.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar								407.000,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah								418.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara								2.090.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai								1.203.400,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								457.875,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat								638.000,0
		Provinsi Papua Selatan	Kab. Merauke								638.000,0
		Provinsi Papua Selatan	Kab. Mappi								638.000,0
	054 - Intensifikasi Tanaman Kelapa										454.480,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen								160.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali								160.875,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Kediri								133.605,0
	055 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										3.534.783,0
		Pusat	Pusat								1.698.337,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								8.900,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara								10.140,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								12.530,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								10.920,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								11.990,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman								11.990,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								10.000,0
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir								680,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								12.480,0
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat								11.990,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								10.920,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin								11.990,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								18.596,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan								11.990,0
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan								12.390,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang								11.990,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat								24.380,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								8.050,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Lingga								11.670,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								23.550,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi								15.990,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur								17.690,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								12.590,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis								12.590,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan								25.250,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon								12.590,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat								12.590,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran								9.190,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								78.230,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								29.725,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas								39.300,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga								12.290,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara								7.950,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen								39.375,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonosobo								39.300,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								12.290,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali								21.940,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonogiri								39.300,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan								13.590,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati								23.640,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								12.290,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								35.840,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								27.560,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul								15.990,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul								11.910,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman								15.990,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								36.580,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ponorogo								11.990,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek								12.290,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Kediri								9.650,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang								4.250,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember								4.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi								12.290,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								20.510,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Nganjuk								12.290,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tuban								12.290,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								14.630,0
		Provinsi Banten	Kab. Lebak								24.580,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								21.120,0
		Provinsi Bali	Kab. Karangasem								10.870,0
		Provinsi Bali	Kab. Buleleng								12.310,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								25.650,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende								12.470,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								6.160,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Mempawah								3.610,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau								7.220,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang								3.610,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang								7.220,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								101.250,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								4.160,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur								6.930,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								5.460,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan								7.510,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								17.400,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow								11.990,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara								11.990,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								12.840,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai								11.990,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una								11.990,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								45.830,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar								39.100,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng								15.990,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto								28.580,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai								13.850,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								29.840,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang								4.250,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								18.720,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan								20.780,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								15.760,0
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara								27.580,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								11.800,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar								12.290,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								12.360,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah								11.990,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								52.440,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								48.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara								38.450,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai								12.590,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								2.390,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								27.380,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat								14.990,0
01.RAI.002	Kawasan Sagu										5.946.302,0
	051 - Perluasan Tanaman Sagu										518.000,0
		Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti								518.000,0
	052 - Penataan Tanaman Sagu										5.136.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								225.000,0
		Kab. Sumenep	NONGGUNONG								223.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								262.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Palopo								198.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe								223.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah								285.000,0
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Timur								285.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								375.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								375.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Waropen								375.000,0
		Provinsi Papua Selatan	Kab. Mappi								770.000,0
		Provinsi Papua Tengah	Kab. Nabire								375.000,0
		Provinsi Papua Tengah	Kab. Mimika								375.000,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Sorong								395.000,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan								395.000,0
	053 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										292.302,0
		Pusat	Pusat								81.402,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								8.160,0
		Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti								6.560,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								4.280,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								7.520,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								6.120,0
		Kab. Sumenep	NONGGUNONG								7.200,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								14.200,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								9.160,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								6.180,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah								6.880,0
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Timur								7.200,0
		Kab. Konawe	LALONGGASUMEEETO								9.480,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								12.640,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								8.160,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								8.160,0
		Provinsi Papua	Kab. Waropen								8.160,0
		Provinsi Papua Selatan	Provinsi Papua Selatan								6.920,0
		Provinsi Papua Selatan	Kab. Mappi								15.680,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Tengah	Provinsi Papua Tengah								15.840,0
		Provinsi Papua Tengah	Kab. Nabire								8.160,0
		Provinsi Papua Tengah	Kab. Mimika								8.160,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Provinsi Papua Barat Daya								11.040,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Sorong								7.520,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan								7.520,0
Total											90.509.020,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya Produksi Tanaman Ekspor dari Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma				90.509.020,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		2.107.938,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	8	kegiatan		2.107.938,0	8	8	8	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.051	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	12,0	Kegiatan	175.661,5	2.107.938,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		318.032,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	5	NSPK		318.032,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AFA.001.051	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	5,0	NSPK	63.606,4	318.032,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan		Unit/ Hektar		88.083.050,0				0,0	0,0	0,0
01.RAI.001	Kawasan Kelapa	11515.01	Hektar		82.136.748,0	6127	6127	6127	0,0	0,0	0,0
01.RAI.001.051	Perluasan Tanaman Kelapa	5.150,0	Ha	11.144,4	57.393.565,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.001.052	Peremajaan Tanaman Kelapa	3.950,0	Ha	5.254,1	20.753.920,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.001.054	Intensifikasi Tanaman Kelapa	300,0	Ha	1.514,9	454.480,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.001.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	105,0	Kegiatan	33.664,6	3.534.783,0	91,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.002	Kawasan Sagu	1700	Hektar		5.946.302,0	1500	1500	1500	0,0	0,0	0,0
01.RAI.002.051	Perluasan Tanaman Sagu	100,0	Ha	5.180,0	518.000,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.002.052	Penataan Tanaman Sagu	1.500,0	Ha	3.424,0	5.136.000,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.002.053	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	25,0	Kegiatan	11.692,1	292.302,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Total					90.509.020,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Produksi Tanaman Ekspor dari Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma		90.509.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.509.020,0
01.AEA	Koordinasi		2.107.938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.107.938,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma		2.107.938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.107.938,0
01.AEA.001.051	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Pendukung	2.107.938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.107.938,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		318.032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318.032,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma		318.032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318.032,0
01.AFA.001.051	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Pendukung	318.032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318.032,0
01.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan		88.083.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88.083.050,0
01.RAI.001	Kawasan Kelapa		82.136.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82.136.748,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.RAI.001.051	Perluasan Tanaman Kelapa	Utama	57.393.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57.393.565,0
01.RAI.001.052	Peremajaan Tanaman Kelapa	Utama	20.753.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.753.920,0
01.RAI.001.054	Intensifikasi Tanaman Kelapa	Utama	454.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454.480,0
01.RAI.001.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	3.534.783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.534.783,0
01.RAI.002	Kawasan Sagu		5.946.302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.946.302,0
01.RAI.002.051	Perluasan Tanaman Sagu	Utama	518.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518.000,0
01.RAI.002.052	Penataan Tanaman Sagu	Utama	5.136.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.136.000,0
01.RAI.002.053	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	292.302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292.302,0
Total			90.509.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.509.020,0

Jakarta, Desember 2025

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si

NIP. 197807272005011001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah
4. KEGIATAN : 1779 - Pelindungan Perkebunan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 05 - Direktorat Pelindungan Perkebunan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan		10.541.168,0
01.01	Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT Perkebunan	47	
01.02	Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40	
01.03	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT	9	
01.04	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Medan	5	
01.05	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Surabaya	6	
01.06	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Ambon	9	
01.07	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BPTP Pontianak	3	
01.08	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	3,5	
Total			10.541.168,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan</i>										10.541.168,0
01.AEA	Koordinasi										2.636.605,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan								007 - Adaptasi perubahan iklim		2.636.605,0
	051 - Koordinasi Pelaksanaan Penguatan Perlindungan Perkebunan										2.636.605,0
		Pusat	Pusat								2.636.605,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										449.825,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan								007 - Adaptasi perubahan iklim		449.825,0
	051 - Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan										449.825,0
		Pusat	Pusat								449.825,0
01.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup										5.120.432,0
01.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan								007 - Adaptasi perubahan iklim		4.310.432,0
	051 - Operasional Laboratorium Lapangan (LL)										1.130.286,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								299.088,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								342.388,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								135.370,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								353.440,0
	052 - Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH)										80.720,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								25.280,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								25.320,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								30.120,0
	053 - Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT										2.142.350,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								738.900,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								604.300,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								188.550,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								610.600,0
	054 - Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan										957.076,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								263.748,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								176.243,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								150.071,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								367.014,0
01.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan								007 - Adaptasi perubahan iklim		810.000,0
	051 - Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan										665.252,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								210.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								123.412,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								181.840,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								150.000,0
	051 - Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan										144.748,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								126.588,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								18.160,0
01.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat										2.334.306,0
01.QDD.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan								004 - Mitigasi perubahan Iklim		2.334.306,0
	051 - Pembinaan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan										2.230.125,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok								204.550,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam								22.320,0
		Provinsi Jambi	Kab. Kerinci								92.202,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam								104.761,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong								22.664,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang								105.684,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga								480.806,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara								113.122,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati								99.746,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								187.819,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								282.936,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pacitan								135.219,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pasuruan								141.606,0
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang								107.715,0
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan								23.040,0
		Provinsi Bali	Kab. Bangli								105.935,0
	052 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										104.181,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								9.572,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								6.092,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								8.588,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								8.918,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								35.804,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								9.656,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								13.388,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								3.090,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								9.073,0
Total											10.541.168,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan				10.541.168,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		2.636.605,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	5	kegiatan		2.636.605,0	7	7	7	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.051	Koordinasi Pelaksanaan Penguatan Perlindungan Perkebunan	10,0	Kegiatan	263.660,5	2.636.605,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		449.825,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7	NSPK		449.825,0	7	7	7	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7,0	NSPK	64.260,7	449.825,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
01.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Unit		5.120.432,0				0,0	0,0	0,0
01.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	62	Unit		4.310.432,0	62	62	62	0,0	0,0	0,0
01.CAG.001.051	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)	26,0	Unit	43.472,5	1.130.286,0	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
01.CAG.001.052	Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH)	3,0	Unit	26.906,7	80.720,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.CAG.001.053	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT	1.140,0	Orang	1.879,3	2.142.350,0	1.140,0	1.140,0	1.140,0	0,0	0,0	0,0
01.CAG.001.054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	31,0	Unit	30.873,4	957.076,0	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	6	Unit		810.000,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.CAG.002.051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	88,0	Paket Teknologi	7.559,7	665.252,0	88,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0
01.CAG.002.051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	80,0	Paket Teknologi	1.809,4	144.748,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
01.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Kelompok Masyarakat		2.334.306,0				0,0	0,0	0,0
01.QDD.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	23	Kelompok Masyarakat		2.334.306,0	20	20	20	0,0	0,0	0,0
01.QDD.001.051	Pembinaan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	6,0	Kelompok Masyarakat	371.687,5	2.230.125,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
01.QDD.001.052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	1,0		104.181,0	104.181,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					10.541.168,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan		10.396.420,0	144.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.541.168,0
01.AEA	Koordinasi		2.636.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.636.605,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan		2.636.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.636.605,0
01.AEA.001.051	Koordinasi Pelaksanaan Penguatan Perlindungan Perkebunan	Utama	2.636.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.636.605,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		449.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449.825,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan		449.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449.825,0
01.AFA.001.051	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	Utama	449.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449.825,0
01.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		4.975.684,0	144.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.120.432,0
01.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan		4.310.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.310.432,0
01.CAG.001.051	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)	Utama	1.130.286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.130.286,0
01.CAG.001.052	Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH)	Utama	80.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.720,0
01.CAG.001.053	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT	Utama	2.142.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.142.350,0
01.CAG.001.054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	Utama	957.076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957.076,0
01.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan		665.252,0	144.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810.000,0
01.CAG.002.051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	Utama	665.252,0	144.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		2.334.306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.334.306,0
01.QDD.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan		2.334.306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.334.306,0
01.QDD.001.051	Pembinaan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Utama	2.230.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.230.125,0
01.QDD.001.052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan		104.181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104.181,0
Total			10.396.420,0	144.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.541.168,0

Jakarta, Desember 2025
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si
NIP. 197807272005011001

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing
4. KEGIATAN : 5888 - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 08 - Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman semusim dan tahunan		1.811.291.962,0
01.01	Produksi Tebu	36.042.266	
01.02	Produksi Lada	70.520	
01.03	Produksi Pala	43.877	
01.04	Produksi Cengkeh	135.448	
01.05	Produksi Vanili	1.511	
01.06	Produksi Kopi	772.258	
01.07	Produksi Kakao	641.416	
01.08	Produksi Karet	2.496.364	
01.09	Produksi Jambu Mete	165.731	
01.10	Produksi Teh	122.485	
01.11	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan	3,5	
01.12	Produksi Tembakau	227.366	
01.13	Produksi Nilam	2.329	
01.14	Produksi Sereh Wangi	5208	
01.15	Produksi Kayu Manis	52.588	
Total			1.811.291.962,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman semusim dan tahunan</i>										1.811.291.962,0
01.AEA	Koordinasi										3.198.610,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Tahunan										3.198.610,0
	051 - Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Tahunan										3.198.610,0
		Pusat	Pusat								3.198.610,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										678.330,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan										678.330,0
	051 - Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan										678.330,0
		Pusat	Pusat								678.330,0
01.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan										1.807.415.022,0
01.RAI.001	Kawasan Lada										15.630.211,0
	051 - Perluasan Tanaman Lada										5.392.400,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto								5.392.400,0
	053 - Rehabilitasi Tanaman Lada										9.612.400,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus								904.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka								944.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung								1.051.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah								944.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan								944.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur								1.051.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang								1.612.200,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe								2.162.200,0
	055 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										625.411,0
		Pusat	Pusat								252.961,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus								56.090,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka								28.720,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung								46.150,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah								28.720,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan								28.720,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur								46.150,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto								33.920,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang								71.680,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe								32.300,0
01.RAI.002	Kawasan Pala				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Pangan	Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	On Farm Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah			41.394.600,0
	051 - Perluasan Tanaman Pala										41.394.600,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur								1.056.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								2.640.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								1.050.400,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan								2.363.400,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara								2.626.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan								1.575.600,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur								2.100.800,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								476.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng								1.666.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								952.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton								1.124.160,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara								1.686.240,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah								3.124.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat								500.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah								2.000.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula								2.032.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan								2.000.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara								1.500.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur								500.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai								1.524.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu								2.286.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								1.000.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan								1.500.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Fak Fak								1.028.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Kaimana								3.084.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.RAI.004	Kawasan Tebu				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Pangan	Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	On Farm Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah			1.446.411.651,0
	051 - Perluasan Tanaman Tebu										86.700.004,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara								25.503.160,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang								1.535.600,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat								1.661.240,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga								307.120,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Klaten								437.064,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sragen								572.852,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan								3.509.180,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora								3.122.580,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang								97.720,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati								5.504.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus								251.280,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								977.200,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pekalongan								133.348,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang								349.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung								2.875.760,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Kediri								5.584.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang								2.846.060,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember								2.804.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi								349.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso								2.944.200,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo								7.010.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo								2.860.080,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto								2.804.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								1.402.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun								2.792.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Magetan								2.792.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi								2.809.760,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan								1.465.800,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar								1.400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Bongkar Ratoon										1.319.641.996,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komerling Ilir								4.893.000,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komerling Ulu Timur								4.907.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah								14.200.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara								7.100.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan								103.639.040,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat								1.060.960,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon								14.000.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka								13.960.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu								14.020.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang								14.020.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga								154.220,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo								84.120,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Klaten								432.620,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo								2.439.480,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonogiri								701.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar								1.233.760,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sragen								35.483.672,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan								3.478.920,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora								13.004.560,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang								33.657.060,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati								39.866.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus								13.960.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								560.800,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang								140.200,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Batang								462.660,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pekalongan								6.605.384,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang								420.600,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Tegal								490.700,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Brebes								626.900,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul								1.397.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman								2.103.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek								98.140,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung								21.562.600,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar								125.640.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Kediri								94.635.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang								209.400.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang								31.545.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember								37.153.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi								11.566.500,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso								26.638.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo								35.120.100,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo								28.040.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pasuruan								17.525.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo								23.834.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto								51.874.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								35.751.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Nganjuk								18.927.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun								35.050.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Magetan								28.040.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi								15.476.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro								701.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tuban								1.402.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan								112.426.380,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik								434.620,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar								2.103.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								5.597.000,0
	055 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										40.069.651,0
		Pusat	Pusat								28.838.706,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								405.800,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komerling Ilir								122.160,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komerling Ulu Timur								122.880,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								450.340,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah								121.098,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara								121.206,0
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan								121.530,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang								121.206,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat								121.476,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								464.092,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon								123.360,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka								122.550,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu								123.270,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang								122.064,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								1.071.680,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga								123.640,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo								122.430,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Klaten								123.280,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo								123.280,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonogiri								123.280,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar								123.280,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sragen								107.980,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan								123.010,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora								108.340,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang								123.280,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati								107.800,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus								123.010,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								123.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang								122.920,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Batang								123.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pekalongan								123.190,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang								123.280,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Tegal								123.460,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Brebes								123.514,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								242.240,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul								122.730,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman								121.830,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								1.250.708,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek								65.920,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung								122.150,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar								129.680,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Kediri								122.120,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang								253.094,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang								122.438,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember								122.438,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi								122.870,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso								122.330,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo								122.330,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo								121.844,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pasuruan								121.844,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo								122.060,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto								121.790,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								121.970,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Nganjuk								122.150,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun								122.150,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Magetan								122.294,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi								122.294,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro								105.640,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tuban								106.850,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan								121.790,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik								77.260,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								402.815,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar								122.640,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								122.790,0
01.RAI.006	Kawasan Kopi										181.696.490,0
	051 - Perluasan Tanaman Kopi										92.063.680,0
		Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues								13.140.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara								2.533.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan								4.645.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok								345.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam								345.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan								20.090.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara								572.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								6.796.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi								860.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur								1.570.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								1.352.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut								4.239.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya								1.884.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang								2.704.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara								2.505.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								2.308.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali								4.420.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar								500.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								1.005.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								5.420.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								295.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo								2.092.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo								1.046.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi								540.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kab. Bangli								580.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa								900.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende								5.253.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi								550.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto								1.086.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa								480.000,0
		Provinsi Papua Selatan	Kab. Merauke								2.008.180,0
	052 - Peremajaan Tanaman Kopi										79.187.400,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah								4.114.000,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar								605.000,0
		Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues								876.000,0
		Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah								2.628.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara								3.462.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Dairi								675.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Samosir								2.997.500,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan								590.000,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam								590.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang								590.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat								3.060.500,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus								1.244.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara								562.500,0
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan								3.985.500,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								5.883.800,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut								1.224.600,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis								590.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat								5.230.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								1.220.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang								1.225.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang								6.084.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso								340.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan								1.220.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Badung								870.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa								650.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada								1.479.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah								650.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur								450.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng								7.266.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Gowa								2.672.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai								5.344.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Barru								2.172.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang								1.125.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang								750.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang								1.125.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								3.258.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja								1.629.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara								750.000,0
	055 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										10.445.410,0
		Pusat	Pusat								4.920.865,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								106.410,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah								74.820,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar								15.870,0
		Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues								108.600,0
		Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah								56.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								78.050,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara								105.190,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Dairi								19.470,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan								55.700,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Samosir								58.170,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								1.979.400,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								95.330,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok								124.900,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan								19.520,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								11.620,0
		Provinsi Jambi	Kab. Kerinci								4.500,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								13.880,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan								17.120,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam								14.605,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								8.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang								16.620,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								38.680,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat								47.320,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus								30.200,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara								31.225,0
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan								49.150,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								131.660,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								18.820,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi								20.520,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur								37.640,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								139.535,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut								78.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya								30.500,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis								16.620,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang								49.320,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat								92.135,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								85.300,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara								56.470,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								66.755,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali								47.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar								18.820,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								18.820,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang								19.135,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								66.320,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								8.700,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								16.620,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								72.600,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang								59.520,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso								81.120,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo								30.500,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo								30.500,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi								18.600,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								29.100,0
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan								19.160,0
		Provinsi Bali	Kab. Badung								20.520,0
		Provinsi Bali	Kab. Bangli								18.820,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								15.130,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa								33.240,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								85.250,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende								56.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada								39.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah								16.620,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur								17.070,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi								16.620,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								172.725,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng								73.470,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto								30.500,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Gowa								55.620,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai								86.970,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Barru								39.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang								17.470,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang								17.470,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang								19.840,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								39.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja								39.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara								18.480,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								8.600,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa								16.620,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Selatan	Kab. Merauke								19.670,0
		Provinsi Papua Selatan	Provinsi Papua Selatan								10.300,0
01.RAI.007	Kawasan Kakao										113.310.510,0
	051 - Perluasan Tanaman Kakao										10.963.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok								1.310.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota								550.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur								550.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah								1.100.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek								550.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun								550.000,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan								800.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau								1.950.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan								650.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso								625.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								2.328.000,0
	052 - Peremajaan Tanaman Kakao										97.310.690,0
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie								1.500.000,0
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya								3.000.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo								1.500.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus								550.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur								2.328.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah								3.492.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran								3.646.240,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								550.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul								550.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ponorogo								1.600.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Jembrana								1.090.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan								1.725.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Badung								1.150.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara								1.300.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur								1.550.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								800.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur								1.400.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow								1.300.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso								5.289.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong								4.123.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi								1.250.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara								3.498.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Barru								1.230.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								3.690.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng								1.230.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo								5.425.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang								2.410.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang								2.460.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang								1.845.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								1.175.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara								5.895.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan								2.320.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana								2.320.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara								3.520.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara								2.320.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur								2.320.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene								2.360.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar								3.575.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa								2.395.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								1.180.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu								625.000,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah								2.850.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula								965.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								2.009.450,0
	055 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										5.036.820,0
		Pusat	Pusat								2.636.106,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								9.600,0
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie								23.100,0
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya								41.700,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								12.260,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo								23.700,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								70.150,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								11.040,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok								26.310,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota								16.870,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								55.393,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur								68.410,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah								57.900,0
		Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran								56.170,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								19.740,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								18.100,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul								18.100,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								83.810,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek								16.240,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								317.960,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun								16.240,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								15.360,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kab. Jembrana								18.100,0
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan								19.170,0
		Provinsi Bali	Kab. Badung								20.190,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								11.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara								19.800,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								13.560,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur								19.170,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								17.470,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur								19.170,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								10.600,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan								17.470,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								13.950,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau								19.640,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan								12.840,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								10.300,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow								18.100,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								71.596,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso								71.340,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong								56.170,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi								15.800,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara								38.700,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								92.200,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Gowa								16.870,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Barru								16.870,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								30.500,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng								17.470,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo								49.670,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang								47.370,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang								19.170,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang								17.500,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara								56.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								55.760,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan								39.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana								39.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara								58.170,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur								39.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								57.590,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene								30.500,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar								43.340,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa								43.340,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								30.500,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu								16.870,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								11.040,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah								20.505,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								9.400,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula								16.870,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								14.760,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								19.160,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.RAI.009	Kawasan Jambu Mete				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Pangan	Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	On Farm Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah			8.971.560,0
	052 - Peremajaan Tanaman Jambu Mete										8.439.300,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur								1.172.125,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								1.640.975,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende								2.344.250,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai								3.281.950,0
	055 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										532.260,0
		Pusat	Pusat								343.010,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								49.650,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur								34.900,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								34.900,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende								34.900,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai								34.900,0
Total											1.811.291.962,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman semusim dan tahunan				1.811.291.962,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		3.198.610,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Tahunan	33	kegiatan		3.198.610,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.051	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Tahunan	15,0	Kegiatan	213.240,7	3.198.610,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				678.330,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan	16	NSPK		678.330,0	16	16	16	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AFA.001.051	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan	11,0	NSPK	61.666,4	678.330,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan		Unit/ Hektar		1.807.415.022,0				0,0	0,0	0,0
01.RAI.001	Kawasan Lada	1200	Hektar		15.630.211,0	1050	1050	1050	0,0	0,0	0,0
01.RAI.001.051	Perluasan Tanaman Lada	0,0		Infinity	5.392.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.001.053	Rehabilitasi Tanaman Lada	850,0	Ha	11.308,7	9.612.400,0	850,0	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.001.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	4,0	Kegiatan	156.352,8	625.411,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.002	Kawasan Pala	8000	Hektar		41.394.600,0	8000	8000	8000	0,0	0,0	0,0
01.RAI.002.051	Perluasan Tanaman Pala	8.000,0	Hektar	5.174,3	41.394.600,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.004	Kawasan Tebu	200453	Hektar		1.446.411.651,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.004.051	Perluasan Tanaman Tebu	32.275,0	Hektar	2.686,3	86.700.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.004.052	Bongkar Ratoon	53.283,0	Hektar	24.766,7	1.319.641.996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.004.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	7,0	kegiatan	5.724.235,9	40.069.651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.006	Kawasan Kopi	17899.999999999996	Hektar		181.696.490,0	15080	15080	15080	0,0	0,0	0,0
01.RAI.006.051	Perluasan Tanaman Kopi	8.610,0	Ha	10.692,6	92.063.680,0	8.610,0	8.610,0	8.610,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.006.052	Peremajaan Tanaman Kopi	7.940,0	Ha	9.973,2	79.187.400,0	8.440,0	8.440,0	8.440,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.006.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	28,0	Kegiatan	373.050,4	10.445.410,0	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.007	Kawasan Kakao	8716.000000000002	Hektar		113.310.510,0	5600	5600	5300	0,0	0,0	0,0
01.RAI.007.051	Perluasan Tanaman Kakao	250,0	Ha	43.852,0	10.963.000,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.007.052	Peremajaan Tanaman Kakao	6.030,0	Ha	16.137,8	97.310.690,0	5.700,0	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.007.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	19,0	Kegiatan	265.095,8	5.036.820,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.009	Kawasan Jambu Mete	1800.02	Hektar		8.971.560,0	1800.01	1800	1800	0,0	0,0	0,0
01.RAI.009.052	Peremajaan Tanaman Jambu Mete	1.800,0	Hektar	4.688,5	8.439.300,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0
01.RAI.009.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	6,0	Keg	88.710,0	532.260,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Total					1.811.291.962,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01	Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman semusim dan tahunan		1.811.291.962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.811.291.962,0
01.AEA	Koordinasi		3.198.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.198.610,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Tahunan		3.198.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.198.610,0
01.AEA.001.051	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Tahunan	Utama	3.198.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.198.610,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		678.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678.330,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan		678.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678.330,0
01.AFA.001.051	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan	Pendukung	678.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678.330,0
01.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan		1.807.415.022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.807.415.022,0
01.RAI.001	Kawasan Lada		15.630.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.630.211,0
01.RAI.001.051	Perluasan Tanaman Lada		5.392.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.392.400,0
01.RAI.001.053	Rehabilitasi Tanaman Lada	Utama	9.612.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.612.400,0
01.RAI.001.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	625.411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625.411,0
01.RAI.002	Kawasan Pala		41.394.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.394.600,0
01.RAI.002.051	Perluasan Tanaman Pala	Utama	41.394.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.394.600,0
01.RAI.004	Kawasan Tebu		1.446.411.651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.446.411.651,0
01.RAI.004.051	Perluasan Tanaman Tebu	Utama	86.700.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86.700.004,0
01.RAI.004.052	Bongkar Ratoon	Utama	1.319.641.996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.319.641.996,0
01.RAI.004.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	40.069.651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.069.651,0
01.RAI.006	Kawasan Kopi		181.696.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181.696.490,0
01.RAI.006.051	Perluasan Tanaman Kopi	Utama	92.063.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.063.680,0
01.RAI.006.052	Peremajaan Tanaman Kopi	Utama	79.187.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.187.400,0
01.RAI.006.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	10.445.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.445.410,0
01.RAI.007	Kawasan Kakao		113.310.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113.310.510,0
01.RAI.007.051	Perluasan Tanaman Kakao	Utama	10.963.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.963.000,0
01.RAI.007.052	Peremajaan Tanaman Kakao	Utama	97.310.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.310.690,0
01.RAI.007.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	5.036.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.036.820,0
01.RAI.009	Kawasan Jambu Mete		8.971.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.971.560,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.RAI.009.052	Peremajaan Tanaman Jambu Mete	Utama	8.439.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.439.300,0
01.RAI.009.055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	532.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532.260,0
Total			1.811.291.962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.811.291.962,0

Jakarta, Desember 2025
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si
NIP. 197807272005011001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah
02 - Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing
4. KEGIATAN : 5889 - Hilirisasi Hasil Perkebunan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 09 - Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan		9.367.343,0
01.01	Nilai Ekspor Perkebunan	31	
01.02	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	3,5	
02	Tersedianya Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan		7.064.273,0
02.01	Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	82	
Total			16.431.616,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan										9.367.343,0
01.AEA	Koordinasi										8.370.968,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan										8.370.968,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	057 - Koordinasi Pelaksanaan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan										3.744.639,0
		Pusat	Pusat								3.744.639,0
	057 - Koordinasi Pelaksanaan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan										4.626.329,0
		Pusat	Pusat								4.626.329,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										996.375,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan										996.375,0
	052 - Penyusunan Pemutakhiran Pedoman Agroindustri Kelapa										25.540,0
		Pusat	Pusat								25.540,0
	053 - Penyusunan Standar/Pedoman terkait Pemasaran Domestik										187.785,0
		Pusat	Pusat								187.785,0
	054 - Penyusunan Standar/Pedoman terkait Pemasaran Internasional										177.215,0
		Pusat	Pusat								177.215,0
	055 - Penyusunan Pedoman/Regulasi/SOP Penanganan Sistem Jaminan Mutu Produk										366.000,0
		Pusat	Pusat								366.000,0
	056 - Penyusunan Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan										172.927,0
		Pusat	Pusat								172.927,0
	057 - Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 06 Tahun 2019										41.368,0
		Pusat	Pusat								41.368,0
	058 - Penyusunan Standar/Pedoman Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan										25.540,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								25.540,0
02	<i>Tersedianya Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan</i>										7.064.273,0
02.PDA	Standarisasi Produk										3.046.723,0
02.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)										3.046.723,0
	051 - Pendataan										1.240.982,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara								32.026,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan								90.466,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu								58.020,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang								86.960,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong								52.886,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong								56.286,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat								10.772,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus								15.260,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								22.884,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang								96.738,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								105.730,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								25.750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng								74.525,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								80.075,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka								82.447,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara								117.270,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur								87.857,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar								65.880,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								79.150,0
	052 - Pemetaan										965.430,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara								21.600,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan								66.890,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu								38.520,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang								80.340,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong								25.110,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong								42.120,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat								1.800,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus								2.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								15.600,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang								83.430,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								121.500,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								18.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng								58.320,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								64.800,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka								64.800,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara								105.300,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur								64.800,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar								48.600,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								41.800,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Verifikasi dan Penerbitan										614.483,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara								22.079,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan								40.589,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu								26.384,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang								45.065,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong								18.890,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong								25.460,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat								2.048,0
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus								2.050,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara								17.632,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang								52.165,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								72.012,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								19.450,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng								35.089,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								38.915,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka								37.745,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara								61.372,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur								38.745,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar								29.400,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								29.393,0
	054 - Pendampingan dan Pengawasan Penerbitan STDB										225.828,0
		Pusat	Pusat								225.828,0
02.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup										2.660.500,0
02.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan										1.455.400,0
	051 - Huller										720.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Toba								40.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong								40.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang								40.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat								40.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi								40.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang								40.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								40.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								40.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang								80.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember								40.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso								40.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang								40.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Lebak								40.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan								40.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Buleleng								40.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur								40.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima								40.000,0
	052 - Pulper										540.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara								30.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Toba								30.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok								30.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong								30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang								30.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat								30.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi								30.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang								30.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								30.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								30.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang								30.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso								30.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang								30.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Lebak								30.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan								30.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Buleleng								30.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur								30.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima								30.000,0
	053 - Alat Pengering Portable Bertenaga Surya										100.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								100.000,0
	056 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										95.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								95.400,0
02.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan										1.205.100,0
	051 - Sarana Fasilitas Pengolahan Kopi										540.000,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat								60.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang								60.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang								60.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung								60.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman								60.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang								60.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo								60.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan								60.000,0
		Provinsi Bali	Kab. Buleleng								60.000,0
	054 - Sarana Fasilitas Pengolahan Sagu										587.800,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								235.120,0
		Provinsi Papua Tengah	Kab. Nabire								235.120,0
		Provinsi Papua	Kab. Waropen								117.560,0
	055 - Sarana Fasilitas Pengolahan Aren										77.300,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone								77.300,0
02.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup										1.357.050,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan										1.357.050,0
	051 - Prasarana Bangunan UPH										1.315.000,0
		Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Sorong								526.000,0
		Provinsi Papua Tengah	Kab. Nabire								526.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Waropen								263.000,0
	052 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										42.050,0
		Pusat	Pusat								42.050,0
Total											16.431.616,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan				9.367.343,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		8.370.968,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	17	kegiatan		8.370.968,0	17	17	17	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.057	Koordinasi Pelaksanaan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	56,0	Kegiatan	66.868,6	3.744.639,0	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.057	Koordinasi Pelaksanaan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	56,0	Kegiatan	82.613,0	4.626.329,0	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		996.375,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan	14	NSPK		996.375,0	14	14	14	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AFA.001.052	Penyusunan Pemutakhiran Pedoman Agroindustri Kelapa	1,0	NSPK	25.540,0	25.540,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.053	Penyusunan Standar/Pedoman terkait Pemasaran Domestik	2,0	NSPK	93.892,5	187.785,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.054	Penyusunan Standar/Pedoman terkait Pemasaran Internasional	1,0	NSPK	177.215,0	177.215,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.055	Penyusunan Pedoman/Regulasi/SOP Penanganan Sistem Jaminan Mutu Produk	4,0	NSPK	91.500,0	366.000,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.056	Penyusunan Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan	3,0	NSPK	57.642,3	172.927,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.057	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 06 Tahun 2019	1,0	NSPK	41.368,0	41.368,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.058	Penyusunan Standar/Pedoman Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1,0	NSPK	25.540,0	25.540,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Tersedianya Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan				7.064.273,0				0,0	0,0	0,0
02.PDA	Standarisasi Produk		produk/ Ekor/ Peralatan/ Rekomendasi/ Standar		3.046.723,0				0,0	0,0	0,0
02.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	13000	Standar		3.046.723,0	13000	13000	13000	0,0	0,0	0,0
02.PDA.001.051	Pendataan	19,0	Kegiatan	65.314,8	1.240.982,0	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
02.PDA.001.052	Pemetaan	19,0	Kegiatan	50.812,1	965.430,0	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
02.PDA.001.053	Verifikasi dan Penerbitan	12.300,0	Standar	50,0	614.483,0	12.300,0	12.300,0	12.300,0	0,0	0,0	0,0
02.PDA.001.054	Pendampingan dan Pengawasan Penerbitan STDB	1,0	Kegiatan	225.828,0	225.828,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Unit		2.660.500,0				0,0	0,0	0,0
02.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	41	Unit		1.455.400,0	37	37	37	0,0	0,0	0,0
02.RAG.001.051	Huller	27,0	Unit	26.666,7	720.000,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
02.RAG.001.052	Pulper	26,0	Unit	20.769,2	540.000,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
02.RAG.001.053	Alat Pengering Portable Bertenaga Surya	0,0	Unit	Infinity	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.RAG.001.056	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	1,0	Kegiatan	95.400,0	95.400,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	15	Unit		1.205.100,0	12	12	12	0,0	0,0	0,0
02.RAG.002.051	Sarana Fasilitas Pengolahan Kopi	13,0	Unit	41.538,5	540.000,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
02.RAG.002.054	Sarana Fasilitas Pengolahan Sagu	2,0		293.900,0	587.800,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.RAG.002.055	Sarana Fasilitas Pengolahan Aren	1,0	Unit	77.300,0	77.300,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		unit		1.357.050,0				0,0	0,0	0,0
02.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	5	unit		1.357.050,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.RBK.002.051	Prasarana Bangunan UPH	0,0		Infinity	1.315.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.RBK.002.052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	1,0	Kegiatan	42.050,0	42.050,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					16.431.616,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan		4.741.014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	9.367.343,0
01.AEA	Koordinasi		3.744.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	8.370.968,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan		3.744.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	8.370.968,0
01.AEA.001.057	Koordinasi Pelaksanaan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Utama	3.744.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	8.370.968,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		996.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	996.375,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi), dan Pemasaran Hasil Perkebunan		996.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	996.375,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Pemutakhiran Pedoman Agroindustri Kelapa	Utama	25.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.540,0
01.AFA.001.053	Penyusunan Standar/Pedoman terkait Pemasaran Domestik	Utama	187.785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187.785,0
01.AFA.001.054	Penyusunan Standar/Pedoman terkait Pemasaran Internasional	Utama	177.215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177.215,0
01.AFA.001.055	Penyusunan Pedoman/Regulasi/SOP Penanganan Sistem Jaminan Mutu Produk	Utama	366.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366.000,0
01.AFA.001.056	Penyusunan Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan	Utama	172.927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172.927,0
01.AFA.001.057	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 06 Tahun 2019	Utama	41.368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.368,0
01.AFA.001.058	Penyusunan Standar/Pedoman Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Utama	25.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.540,0
02	Tersedianya Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan		7.064.273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.064.273,0
02.PDA	Standarisasi Produk		3.046.723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.046.723,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
02.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)		3.046.723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.046.723,0
02.PDA.001.051	Pendataan	Utama	1.240.982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.240.982,0
02.PDA.001.052	Pemetaan	Utama	965.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965.430,0
02.PDA.001.053	Verifikasi dan Penerbitan	Utama	614.483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	614.483,0
02.PDA.001.054	Pendampingan dan Pengawasan Penerbitan STDB	Pendukung	225.828,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225.828,0
02.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		2.660.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.660.500,0
02.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan		1.455.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455.400,0
02.RAG.001.051	Huller	Utama	720.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720.000,0
02.RAG.001.052	Pulper	Utama	540.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540.000,0
02.RAG.001.053	Alat Pengering Portable Bertenaga Surya	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
02.RAG.001.056	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	95.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95.400,0
02.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan		1.205.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.205.100,0
02.RAG.002.051	Sarana Fasilitas Pengolahan Kopi	Utama	540.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540.000,0
02.RAG.002.054	Sarana Fasilitas Pengolahan Sagu		587.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587.800,0
02.RAG.002.055	Sarana Fasilitas Pengolahan Aren	Utama	77.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77.300,0
02.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		1.357.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.357.050,0
02.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan		1.357.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.357.050,0
02.RBK.002.051	Prasarana Bangunan UPH		1.315.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.315.000,0
02.RBK.002.052	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	42.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.050,0
Total			11.805.287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.329,0	0,0	0,0	0,0	16.431.616,0

Jakarta, Desember 2025

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si

NIP. 197807272005011001

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. SASARAN PROGRAM : 02 - Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing
4. KEGIATAN : 5890 - Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 10 - Direktorat Perbenihan Perkebunan
07 - Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tersedianya benih tanaman perkebunan		1.026.539.832,0
01.01	Jumlah benih kelapa sawit yang dihasilkan	27.117.560	
01.02	Jumlah benih kakao yang dihasilkan	6.250.560	
01.03	Jumlah benih kopi yang dihasilkan	22.461.600	
01.04	Jumlah benih kelapa yang dihasilkan	3.557.442	
01.05	Jumlah benih karet yang dihasilkan	7.778.570	
01.06	Jumlah benih jambu mete yang dihasilkan	1.142.539	
01.07	Jumlah benih aren yang dihasilkan	12.000	
01.08	Jumlah benih teh yang dihasilkan	1.519.400	
01.09	Jumlah benih sagu yang dihasilkan	83.299	
01.10	Jumlah benih tebu yang dihasilkan	1.422.540.877	
01.11	Jumlah benih lada yang dihasilkan	8.380.164	
01.12	Jumlah benih pala yang dihasilkan	3.501.598	
01.13	Jumlah benih cengkeh yang dihasilkan	1.703.983	
01.14	Jumlah benih tembakau yang dihasilkan	279.977	
01.15	Jumlah benih vanili yang dihasilkan	1.417.500	
01.16	Jumlah benih sereh wangi yang dihasilkan	4.258.073	
01.17	Jumlah benih nilam yang dihasilkan	928.262	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01.18	Jumlah benih kayu manis yang dihasilkan	1.505.976	
01.19	Jumlah layanan publik kelembagaan benih perkebunan yang diberikan	9	
01.20	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Medan	4	
01.21	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Surabaya	6	
01.22	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Ambon	4	
01.23	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	3,5	
Total			1.026.539.832,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Tersedianya benih tanaman perkebunan</i>										1.026.539.832,0
01.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan										783.880,0
01.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan										783.880,0
	051 - Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan										438.340,0
		Pusat	Pusat								438.340,0
	051 - Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan										8.000,0
		Pusat	Pusat								8.000,0
	052 - Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan										246.980,0
		Pusat	Pusat								246.980,0
	053 - Rekomendasi Standarisasi Layanan Laboratorium UPTD										90.560,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								45.490,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								45.070,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEA	Koordinasi										2.780.053,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan										2.780.053,0
	055 - Koordinasi Pelaksanaan Penguatan Perbenihan Perkebunan										2.780.053,0
		Pusat	Pusat								2.780.053,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										306.450,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan										306.450,0
	051 - Penyusunan Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perbenihan Tanaman Perkebunan										306.450,0
		Pusat	Pusat								306.450,0
01.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk										4.905.120,0
01.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan										3.192.978,0
	051 - Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan										2.170.605,0
		Pusat	Pusat								135.030,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								1.245.461,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								450.768,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								339.346,0
	051 - Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan										1.022.373,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								995.247,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								27.126,0
01.BJA.002	Pengujian Mutu Benih										1.712.142,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengujian Mutu Benih										1.605.025,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								581.801,0
		Kab. Soppeng	LALABATA								477.224,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								546.000,0
	051 - Pengujian Mutu Benih										107.117,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								27.991,0
		Kab. Soppeng	LALABATA								27.126,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								52.000,0
01.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup										74.695.694,0
01.RBK.002	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan										74.695.694,0
	051 - Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam										74.211.874,0
		Pusat	Pusat								72.771.446,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								337.465,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas								185.125,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								584.715,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								333.123,0
	052 - Pengawasan Kegiatan Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam										483.820,0
		Pusat	Pusat								483.820,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup										943.068.635,0
01.RDK.001	Operasional Nursery										927.165.071,0
	051 - Operasional Nursery										927.165.071,0
		Pusat	Pusat								919.526.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								287.900,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								6.413.671,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								937.500,0
01.RDK.002	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan										15.903.564,0
	051 - Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam										1.873.724,0
		Pusat	Pusat								49.052,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat Daya								29.730,0
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir								82.760,0
		Provinsi Jambi	Kab. Muaro Jambi								7.548,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								25.905,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan								73.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas								10.786,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang								78.700,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								60.802,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas								102.035,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								6.830,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								26.331,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								15.062,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								49.765,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur								29.168,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow								65.350,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara								31.953,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara								65.350,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan								44.128,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai								42.428,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala								13.290,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								42.650,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar								78.233,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba								48.840,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo								53.900,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu								73.574,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna								26.510,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe								40.139,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan								36.201,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana								53.484,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								37.278,0
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara								25.996,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								116.426,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								39.852,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								18.594,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula								15.504,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan								8.853,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara								35.158,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai								95.840,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								30.132,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Fak Fak								51.835,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Kaimana								34.252,0
	052 - Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul										2.418.954,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah								17.345,0
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar								50.666,0
		Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah								52.035,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu								22.248,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo								3.950,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Batu Bara								41.970,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota								33.944,0
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir								57.051,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti								81.560,0
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat								27.500,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam								5.820,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								14.892,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan								39.895,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								4.993,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen								133.650,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati								123.245,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo								64.600,0
		Provinsi Banten	Kab. Lebak								2.486,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								10.482,0
		Provinsi Bali	Kab. Jembrana								192.080,0
		Provinsi Bali	Kab. Gianyar								10.780,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa								27.725,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor								7.650,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								6.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara								74.057,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur								17.294,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara								159.869,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon								34.950,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai								96.580,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol								14.898,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar								111.715,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								47.460,0
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo								56.052,0
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato								111.242,0
		Provinsi Gorontalo	Kab. Bone Bolango								4.750,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah								146.800,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah								6.814,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan								68.140,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara								81.768,0
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai								11.430,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								136.280,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan								54.512,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Fak Fak								119.696,0
		Provinsi Papua	Kab. Keerom								10.560,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura								21.120,0
	053 - Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lokal										490.128,0
		Provinsi Aceh	Kab. Bireuen								15.040,0
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur								53.854,0
		Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat								17.222,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah								20.678,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan								30.117,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi								25.344,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur								62.850,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi								45.719,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								10.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang								26.920,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan								16.880,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara								84.012,0
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo								25.525,0
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato								41.565,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar								13.902,0
	054 - Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Benih Tanaman Perkebunan										143.550,0
		Pusat	Pusat								143.550,0
	055 - Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan										10.040.446,0
		Pusat	Pusat								10.040.446,0
	056 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan										936.762,0
		Pusat	Pusat								936.762,0
Total											1.026.539.832,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tersedianya benih tanaman perkebunan				1.026.539.832,0				0,0	0,0	0,0
01.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		783.880,0				0,0	0,0	0,0
01.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	17	Rekomendasi Kebijakan		783.880,0	17	17	17	0,0	0,0	0,0
01.ABR.001.051	Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan	160,0	Rekomendasi	2.739,6	438.340,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
01.ABR.001.051	Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan	160,0	Rekomendasi	50,0	8.000,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
01.ABR.001.052	Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan	5,0	Rekomendasi	49.396,0	246.980,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.ABR.001.053	Rekomendasi Standarisasi Layanan Laboratorium UPTD	2,0	Rekomendasi	45.280,0	90.560,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		2.780.053,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi, Birteknologi, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	7	kegiatan		2.780.053,0	7	7	7	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.055	Koordinasi Pelaksanaan Penguatan Perbenihan Perkebunan	7,0	Kegiatan	397.150,4	2.780.053,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		306.450,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	6	NSPK		306.450,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Penyusunan Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perbenihan Tanaman Perkebunan	1,0	NSPK	306.450,0	306.450,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk		Produk		4.905.120,0				0,0	0,0	0,0
01.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	61409600	Produk		3.192.978,0	72319200	72319200	72319200	0,0	0,0	0,0
01.BJA.001.051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	971.553.600,0	Batang	0,0	2.170.605,0	971.553.600,0	971.553.600,0	971.553.600,0	0,0	0,0	0,0
01.BJA.001.051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	970.553.600,0	Batang	0,0	1.022.373,0	970.553.600,0	970.553.600,0	970.553.600,0	0,0	0,0	0,0
01.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	12589740	Produk		1.712.142,0	12589740	12589740	12589740	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BJA.002.051	Pengujian Mutu Benih	201.435.840,0	Batang	0,0	1.605.025,0	201.435.840,0	201.435.840,0	201.435.840,0	0,0	0,0	0,0
01.BJA.002.051	Pengujian Mutu Benih	201.435.840,0	Batang	0,0	107.117,0	201.435.840,0	201.435.840,0	201.435.840,0	0,0	0,0	0,0
01.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		unit		74.695.694,0				0,0	0,0	0,0
01.RBK.002	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	1580	unit		74.695.694,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.RBK.002.051	Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam	23,7	Ha	3.129.982,0	74.211.874,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.RBK.002.052	Pengawasan Kegiatan Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam	1,0	Kegiatan	483.820,0	483.820,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		unit		943.068.635,0				0,0	0,0	0,0
01.RDK.001	Operasional Nursery	78	unit		927.165.071,0	9	9	9	0,0	0,0	0,0
01.RDK.001.051	Operasional Nursery	79,0	Unit	11.736.266,7	927.165.071,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
01.RDK.002	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	635	unit		15.903.564,0	609	609	609	0,0	0,0	0,0
01.RDK.002.051	Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam	193,0	Ha	9.708,4	1.873.724,0	199,0	199,0	199,0	0,0	0,0	0,0
01.RDK.002.052	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul	367,0	Ha	6.591,2	2.418.954,0	375,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
01.RDK.002.053	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lokal	51,0		9.608,5	490.128,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
01.RDK.002.054	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Benih Tanaman Perkebunan	1,0	Rekomendasi	143.550,0	143.550,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.RDK.002.055	Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	49,0	Rekomendasi	204.907,1	10.040.446,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.RDK.002.056	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	77,0	Kegiatan	12.165,7	936.762,0	77,0	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0
Total					1.026.539.832,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tersedianya benih tanaman perkebunan		1.025.402.342,0	1.137.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.026.539.832,0
01.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		775.880,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783.880,0
01.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan		775.880,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783.880,0
01.ABR.001.051	Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Utama	438.340,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446.340,0
01.ABR.001.052	Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan	Utama	246.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246.980,0
01.ABR.001.053	Rekomendasi Standarisasi Layanan Laboratorium UPTD	Utama	90.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.560,0
01.AEA	Koordinasi		2.780.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.780.053,0
01.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan		2.780.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.780.053,0
01.AEA.001.055	Koordinasi Pelaksanaan Penguatan Perbenihan Perkebunan	Pendukung	2.780.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.780.053,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		306.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.450,0
01.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan		306.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.450,0
01.AFA.001.051	Penyusunan Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perbenihan Tanaman Perkebunan	Pendukung	306.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.450,0
01.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk		3.775.630,0	1.129.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.905.120,0
01.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan		2.170.605,0	1.022.373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.192.978,0
01.BJA.001.051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	Utama	2.170.605,0	1.022.373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.192.978,0
01.BJA.002	Pengujian Mutu Benih		1.605.025,0	107.117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.712.142,0
01.BJA.002.051	Pengujian Mutu Benih	Utama	1.605.025,0	107.117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.712.142,0
01.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		74.695.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.695.694,0
01.RBK.002	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan		74.695.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.695.694,0
01.RBK.002.051	Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam	Utama	74.211.874,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.211.874,0
01.RBK.002.052	Pengawasan Kegiatan Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam	Pendukung	483.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483.820,0
01.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		943.068.635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943.068.635,0
01.RDK.001	Operasional Nursery		927.165.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.165.071,0
01.RDK.001.051	Operasional Nursery	Utama	927.165.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927.165.071,0
01.RDK.002	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan		15.903.564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.903.564,0
01.RDK.002.051	Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam	Utama	1.873.724,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.873.724,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.RDK.002.052	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul	Utama	2.418.954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.418.954,0
01.RDK.002.053	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lokal		490.128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490.128,0
01.RDK.002.054	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Benih Tanaman Perkebunan	Pendukung	143.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143.550,0
01.RDK.002.055	Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Utama	10.040.446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.040.446,0
01.RDK.002.056	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	Pendukung	936.762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	936.762,0
Total			1.025.402.342,0	1.137.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.026.539.832,0

Jakarta, Desember 2025
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si
NIP. 197807272005011001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien
02 - Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel
4. KEGIATAN : 1780 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 06 - Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		103.752.782,0
01.01	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,91	
01.02	Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan	3	
01.03	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan	4	
01.04	Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang Ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan	85	
01.05	Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang Diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90	
01.06	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan yang diberikan	3	
01.07	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya yang diberikan	3	
01.08	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon yang diberikan	3	
01.09	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak yang diberikan	3	
02	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas		5.246.615,0
02.01	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85	
03	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang efektif, efisien dan akuntabel		0,0
04	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel		0,0
04.01	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	3,5	
05	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang efektif, efisien dan akuntabel		0,0
05.01	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	3,5	
06	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
06.01	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	3,5	
07	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel		0,0
07.01	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	3,5	
Total			108.999.397,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien</i>										103.752.782,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										102.433.352,0
01.EBA.956	Layanan BMN										338.790,0
	051 - Pengelolaan Barang Milik Negara Pusat										301.400,0
		Pusat	Pusat								301.400,0
	052 - Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat										37.390,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								7.790,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								10.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								9.600,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								10.000,0
01.EBA.957	Layanan Hukum										1.015.520,0
	051 - Pelayanan Hukum Pusat										752.960,0
		Pusat	Pusat								752.960,0
	052 - Pelayanan Perizinan										262.560,0
		Pusat	Pusat								262.560,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi										357.230,0
	051 - Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat										357.230,0
		Pusat	Pusat								357.230,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal										423.604,0
	051 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal										423.604,0
		Pusat	Pusat								423.604,0
01.EBA.962	Layanan Umum										16.589.178,0
	051 - Pelayanan Rumah Tangga dan Umum Pusat										12.876.296,0
		Pusat	Pusat								12.876.296,0
	052 - Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat										3.712.882,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								1.011.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								949.343,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								623.539,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								1.129.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi										1.281.100,0
	051 - Pengelolaan Data dan Informasi Pusat										1.281.100,0
		Pusat	Pusat								1.281.100,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran										82.427.930,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										60.116.639,0
		Pusat	Pusat								29.073.134,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								11.163.655,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								9.841.696,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								4.068.381,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								5.969.773,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										22.311.291,0
		Pusat	Pusat								12.585.528,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								2.920.335,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								3.797.254,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								1.799.213,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								1.208.961,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										350.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal										350.000,0
	051 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pusat										350.000,0
		Pusat	Pusat								350.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										810.230,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM										810.230,0
	051 - Pengelolaan Kepegawaian Pusat										487.050,0
		Pusat	Pusat								487.050,0
	052 - Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat										323.180,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								30.170,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								67.010,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								150.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								76.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										159.200,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan										159.200,0
	051 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan										159.200,0
		Pusat	Pusat								159.200,0
02	<i>Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas</i>										5.246.615,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										5.246.615,0
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran										2.035.000,0
	051 - Penyusunan Rencana Program Pusat										1.110.000,0
		Pusat	Pusat								1.110.000,0
	052 - Penyusunan Rencana Anggaran Pusat										555.000,0
		Pusat	Pusat								555.000,0
	054 - Penyusunan Rencana Kerjasama Teknis Perkebunan										370.000,0
		Pusat	Pusat								370.000,0
02.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi										1.379.380,0
	051 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pusat										990.020,0
		Pusat	Pusat								990.020,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat										149.410,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								45.780,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								28.630,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								35.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								40.000,0
	053 - Pelaporan dan Pengendalian Internal										239.950,0
		Pusat	Pusat								239.950,0
02.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan										1.832.235,0
	051 - Pengelolaan Keuangan Pusat										1.772.950,0
		Pusat	Pusat								1.772.950,0
	053 - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat										59.285,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								11.230,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang								10.055,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								19.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								19.000,0
Total											108.999.397,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien				103.752.782,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		102.433.352,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan		338.790,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.051	Pengelolaan Barang Milik Negara Pusat	1,0	Layanan	301.400,0	301.400,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.052	Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat	4,0	Layanan	9.347,5	37.390,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	2	Layanan		1.015.520,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.051	Pelayanan Hukum Pusat	1,0	Layanan	752.960,0	752.960,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.052	Pelayanan Perizinan	1,0	Layanan	262.560,0	262.560,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		357.230,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.051	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat	1,0	Layanan	357.230,0	357.230,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		423.604,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.051	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,0	Layanan	423.604,0	423.604,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan		16.589.178,0	5	5	0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.051	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum Pusat	1,0	Layanan	12.876.296,0	12.876.296,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.052	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat	4,0	Layanan	928.220,5	3.712.882,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		1.281.100,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.051	Pengelolaan Data dan Informasi Pusat	1,0	Layanan	1.281.100,0	1.281.100,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan		82.427.930,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	5,0	Layanan	12.023.327,8	60.116.639,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0,0	Layanan	Infinity	22.311.291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		350.000,0				0,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit		350.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pusat	1,0	Unit	350.000,0	350.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		810.230,0				0,0	0,0	0,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	759	Orang		810.230,0	759	759	759	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.051	Pengelolaan Kepegawaian Pusat	370,0	Orang	1.316,4	487.050,0	370,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat	389,0	Orang	830,8	323.180,0	389,0	389,0	389,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		159.200,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		159.200,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974.051	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,0	Dokumen	159.200,0	159.200,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas				5.246.615,0				0,0	0,0	0,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		5.246.615,0				0,0	0,0	0,0
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10	Dokumen		2.035.000,0	10	10	10	0,0	0,0	0,0
02.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program Pusat	5,0	Dokumen	222.000,0	1.110.000,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.952.052	Penyusunan Rencana Anggaran Pusat	3,0	Dokumen	185.000,0	555.000,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.952.054	Penyusunan Rencana Kerjasama Teknis Perkebunan	2,0	Dokumen	185.000,0	370.000,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen		1.379.380,0	8	8	8	0,0	0,0	0,0
02.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pusat	3,0	Dokumen	330.006,7	990.020,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.953.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat	4,0	Dokumen	37.352,5	149.410,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.953.053	Pelaporan dan Pengendalian Internal	1,0	Dokumen	239.950,0	239.950,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	13	Dokumen		1.832.235,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
02.EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan Pusat	1,0	Dokumen	1.772.950,0	1.772.950,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.955.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat	4,0	Dokumen	14.821,3	59.285,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Total					108.999.397,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien		103.752.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103.752.782,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		102.433.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102.433.352,0
01.EBA.956	Layanan BMN		338.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338.790,0
01.EBA.956.051	Pengelolaan Barang Milik Negara Pusat	Utama	301.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.EBA.956.052	Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat	Utama	37.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.390,0
01.EBA.957	Layanan Hukum		1.015.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.015.520,0
01.EBA.957.051	Pelayanan Hukum Pusat	Utama	752.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	752.960,0
01.EBA.957.052	Pelayanan Perizinan	Pendukung	262.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262.560,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		357.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357.230,0
01.EBA.958.051	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat	Utama	357.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357.230,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		423.604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423.604,0
01.EBA.960.051	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Utama	423.604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423.604,0
01.EBA.962	Layanan Umum		16.589.178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.589.178,0
01.EBA.962.051	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum Pusat	Utama	12.876.296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.876.296,0
01.EBA.962.052	Pelayanan Rumah Tangga dan Umum UPT Pusat	Utama	3.712.882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.712.882,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1.281.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.281.100,0
01.EBA.963.051	Pengelolaan Data dan Informasi Pusat	Utama	1.281.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.281.100,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		82.427.930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82.427.930,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	60.116.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.116.639,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	22.311.291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.311.291,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pusat	Utama	350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		810.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810.230,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		810.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810.230,0
01.EBC.954.051	Pengelolaan Kepegawaian Pusat	Utama	487.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487.050,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat	Utama	323.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323.180,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		159.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159.200,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		159.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159.200,0
01.EBD.974.051	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Utama	159.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159.200,0
02	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas		5.246.615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.246.615,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		5.246.615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.246.615,0
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		2.035.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.035.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
02.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program Pusat	Utama	1.110.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110.000,0
02.EBD.952.052	Penyusunan Rencana Anggaran Pusat	Utama	555.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555.000,0
02.EBD.952.054	Penyusunan Rencana Kerjasama Teknis Perkebunan	Utama	370.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.000,0
02.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.379.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.379.380,0
02.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pusat	Utama	990.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990.020,0
02.EBD.953.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat	Utama	149.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149.410,0
02.EBD.953.053	Pelaporan dan Pengendalian Internal	Utama	239.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.950,0
02.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1.832.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.832.235,0
02.EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan Pusat	Utama	1.772.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.772.950,0
02.EBD.955.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat	Utama	59.285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.285,0
Total			108.999.397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108.999.397,0

Jakarta, Desember 2025

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si

NIP. 197807272005011001